

**KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

TESIS

OLEH

**ELY HARDANI
NPM. 121801094**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue**

Nama : Ely Hardani

NPM : 121801094

Menyetujui

Pembimbing I



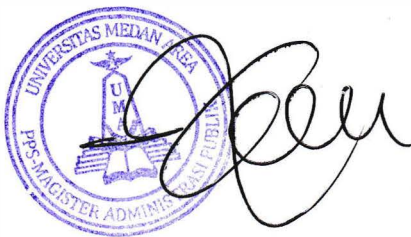
Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



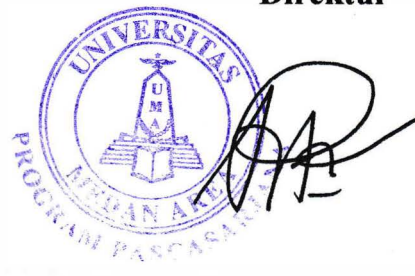
Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2014

Nama : Ely Hardani

NPM : 121801094



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Ir. Azwana, MP

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2014

Yang menyatakan,



Ely Hardani

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis masih dapat menyelesaikan penelitian: “KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE)”.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan waktu yang dimiliki dan belum sepenuhnya penulis mampu menyajikan suatu permasalahan secara keseluruhan mengenai hal-hal yang belum terungkap dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Pembimbing I yang sangat membantu kelancaran dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. R. Hamdani Harahap, MSi sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;

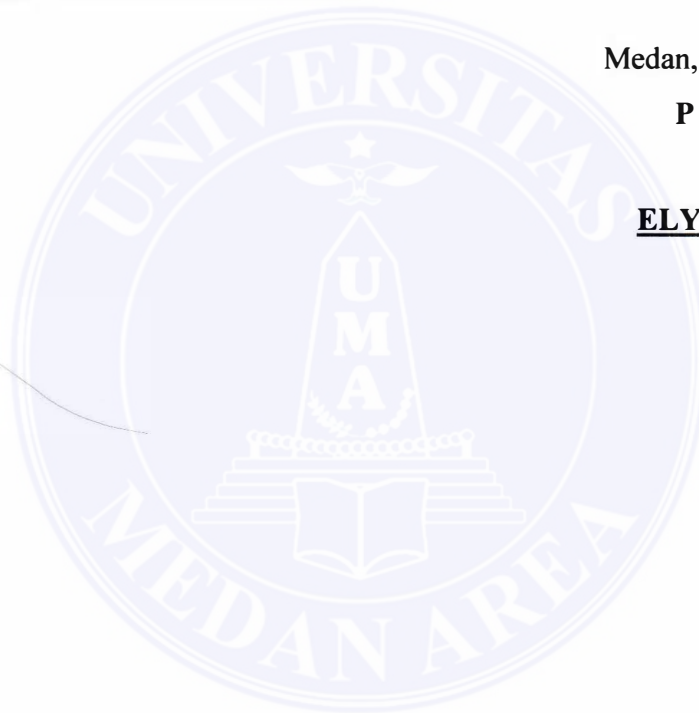
5. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti perkuliahan;

Semoga ilmu, dukungan serta dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Medan, April 2014

Penulis

ELY HARDANI



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Kinerja.....	10
2.2 Batasan dan Ruang Lingkup Kinerja	31
2.3 Penilaian Kinerja.....	32
2.3.1. Syarat Penilaian Kinerja	34
2.3.2. Metode Penilaian Kinerja	35
2.3.3. Paradigma Penilaian Kinerja	37
2.4. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38
2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	41
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian.....	60
3.3 Populasi dan Sampel	60
3.4 Variabel dan Operasionalisasi Konsep	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	64
3.6 Teknik Analisa Data	65

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simeulue	66
4.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
5.1 Hasil Penelitian	92
5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
6.1 Kesimpulan	116
6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012	78
Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012	79
Tabel 3. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012	80
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, Good Governance oleh UNDP dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, Good Governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama Good Governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya (Novi Arinda Kusumawati, 2014:35).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan good governance tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan suatu sistem Pemerintahan yang layak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain Pemerintahan yang layak harus didasari oleh Birokrasi yang profesional. Birokrasi yang profesional adalah suatu pemerintahan yang bersih, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab. Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih responsif semaraknya masyarakat sipil dan kehidupan bisnis yang bertanggung (Aldilah Ambar Kusuma, 2013:43).

Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Aldilah Ambar Kusuma, 2013:45).

Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good Governance dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah pervasifnya korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aldilah Ambar Kusuma, 2013, *Transparansi Informasi dalam Rangka Good Corporate Governance pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 9.
- Aimee Williamson & Douglas Snow, 2014, *From Accountability to Decision-Making? Budgeting with Mandated Performance Measures*, International Journal of Public Administration Volume 37, Issue 4.
- Bachtiar Arif, 2001, *Akuntabilitas Keuangan Negara: Antara Harapan dan Realitas*, Jurnal Akuntabilitas Vol 1 No.1
- Christopher A. Cooper, Dale Carpenter, Audrey Reiner & David M. McCord, 2014, *Personality and Job Satisfaction: Evidence from a Sample of Street-Level Bureaucrats* Journal of Public Administration Volume 36, Issue 3
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku 1*. Jakarta : Indeks
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 2000
- Gomes, Faustino Cardoso, Dr. 2003. *MSDM*. Yogyakarta : Andi
- Helen Dickinson, 2014, *Public Service Commissioning: What can be Learned from the UK Experience?*, Australian Journal of Public Administration
- Ibrahim, Amin, 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Jakarta: Refika Aditama.
- J.B. Gharthey, 1998, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, Massachusetts.
- Kartasasmita, Pius Suratman, 2006. *Bringing The Public Back In : Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta; Graha Ilmu.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Ilmu.
-, 1999, *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia
- Ledvina V. Carino, 2002, *Administrative Accoumtability*, San Francisco State University Fall.

- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Novi Arinda Kusumawati, 2014, *Good Governance Between Government and Society in Developing Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) (The Study on Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh Beach, Tulungagung)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 1.
- Nadir, 2010, *Memformat Equity And Equality Antara DPR Dan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tahun*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Volume I, Nomor 1
- Payaman Simanjuntak, 2005, *Evaluasi Manajemen Kinerja*, Jakarta.
- Polidano, C., "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." *Public Policy and Administration* 13, No. 1, Spring 1998, p 38.
- Ruky. , Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahrudin Rasul, 2000. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*, Jakarta.
- Soetopo, 1999, *Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang. 2002. *Manajemen SDM*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Offset.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- World Bank, "*Strengthening Local Government in Sub-Saharan Africa*," EDI Policy Seminar Report No. 21, Washington DC, 1989.
- World Bank, Governance and Development, Washington, D.C., 1992.

UNDANG-UNDANG

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 *tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 *Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua*, Jakarta, 2004.